

**PROGRAM KELUARGA MERDEKA (PKM) SEBAGAI
PENDIDIKAN ALTERNATIF HUMANIS BERBASIS KELUARGA
PADA MASYARAKAT BERKEBUTUHAN KHUSUS DI MASA
PANDEMI COVID-19**

Mirda Yanti¹, Irfan Hermawan² and Mustika Natalia³ Pendidikan Sosiologi,
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia.

¹mirdayanti.2020@student.uny.ac.id, ²irfanhermawan449@gmail.com,

³mustikanatalia.2019@student.uny.ac.id

Abstrak

Based on data from the Central Statistics Agency (BPS) in 2020, the level of education Lastly, most people with disabilities do not finish primary school (SD), which is 29.35%. As many as 26.32% of people with disabilities are graduates elementary school. Persons with disabilities who never went to school reached 20.51%. Then, people with disabilities whose last education was high school junior high school (SMP) by 9.97%, high school (SM) 10.47%, and college high (PT) 3.38% (BPS, 2020). Based on these data it can be said that The fulfillment of access to proper education for persons with disabilities is still very low lacking and need to be improved. In practice, the maintenance of Inclusive education in Indonesia currently still has many obstacles. PKM is a program offered to overcome educational inequality on people with disabilities. The form of the Independent Family Program is in the form of: empowerment activities for people with disabilities that focus on fulfilling access to education for people with disabilities who are still not met by government. This PKM has a working principle that adopts four basic principles from Driyarkara namely 4 H humanism, humanization, humanities and humanity. PKM can be implemented and cooperate with related parties such as: the Ministry of Social Affairs and the Ministry of Education, as well as several partners, including; Psychologists, Psychiatrists, Special School Teachers and Social Services and Regional Education Offices. The method used to build is the Research Method and Development (R&D). The development model used is ADDIE or Analyze, Design, Develop, Implement and Evaluate. This media design includes stages: (1) needs analysis, (2) design, (3) product development, (4) implementation, (5) Evaluation. This program is expected to be able to become an innovation new in the world of education, especially in the field of development learning of inclusive education in Indonesia.

Keywords: *Disability, Humanism, Education, Inequality,*

Pendahuluan

Berdasarkan data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2018 tercatat sebanyak 222,135 ribu penyandang disabilitas dengan prosentase jenis kelamin laki-laki 56,7% dan perempuan 43,3%. Kemudian dari data Kementerian Sosial RI juga diketahui bahwa jumlah penyandang tuna daksa berjumlah 6.554 orang, eks kusta/penyakit 2.486 orang, ganda atau multi 65.139 orang, gangguan mental 26.578 orang, autisme 3.826, tuna runtu 13.803 orang, tuna wicara 5.584 orang, *low vision* 6.811 orang, *total blind* 11.362 orang, lambat belajar 36.72 orang, tuna grahita 13.139 orang, dan *down syndrom* 4.191 orang (Kemensos, 2018).

UU Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai: Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Widinarsih, 2019). Dalam data Riskesdas tahun 2018 diketahui bahwa 3,3% anak umur 5-17 tahun yang mengalami disabilitas, pada umur 18-59 tahun di Indonesia sebesar 22,0%, sedangkan pada usia lanjut sebanyak 74,3% lansia dapat beraktivitas sehari-hari secara mandiri, 22,0% mengalami hambatan ringan; 1,1% hambatan sedang; 1% hambatan berat; dan 1,6% mengalami ketergantungan total (Ismandari, 2019).

Berdasarkan data tersebut perlu adanya dukungan terhadap kaum disabilitas, salah satunya adalah pemenuhan hak-hak mereka di bidang pendidikan. Begitu banyaknya kaum disabilitas di Indonesia maka perlu adanya dukungan program pendidikan dan kegiatan yang mengacu pada asas kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas tersebut yang dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan didukung dengan sarana dan prasarana khusus bagi kaum penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, tingkat pendidikan terakhir sebagian besar penyandang disabilitas adalah tidak tamat sekolah dasar (SD), yakni 29,35%. Sebanyak 26,32% penyandang disabilitas merupakan tamatan SD. Penyandang disabilitas yang tidak pernah sekolah mencapai 20,51%. Kemudian, penyandang disabilitas yang pendidikan terakhirnya sekolah menengah pertama (SMP) sebesar 9,97%, sekolah menengah (SM) 10,47%, dan perguruan tinggi (PT) 3,38% (BPS, 2020). Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa pemenuhan akses pendidikan yang layak pada kaum disabilitas masih sangat kurang dan perlu untuk ditingkatkan. Saat ini keberadaan pendidikan inklusi di Indonesia sangat terbatas, sedangkan jumlah masyarakat disabilitas yang membutuhkan pendidikan semakin meningkat. Oleh sebab itu peningkatan akses pendidikan pada kaum disabilitas sangat penting untuk direalisasikan, terutama pada kondisi pandemi yang dialami saat ini. Betapa sangat kesulitan masyarakat disabilitas dalam mengakses pendidikan dikarenakan keterbatasan teknologi dan juga akses pembelajaran saat pandemi. Dalam hal ini peran masyarakat dan lembaga pendidikan nonformal sangat dibutuhkan dan memiliki peran yang kuat dalam merealisasikan kebijakan ini. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan hak-hak mereka secara adil dan merata. Oleh sebab itu perlu adanya program atau kebijakan khusus dalam mendukung hak-

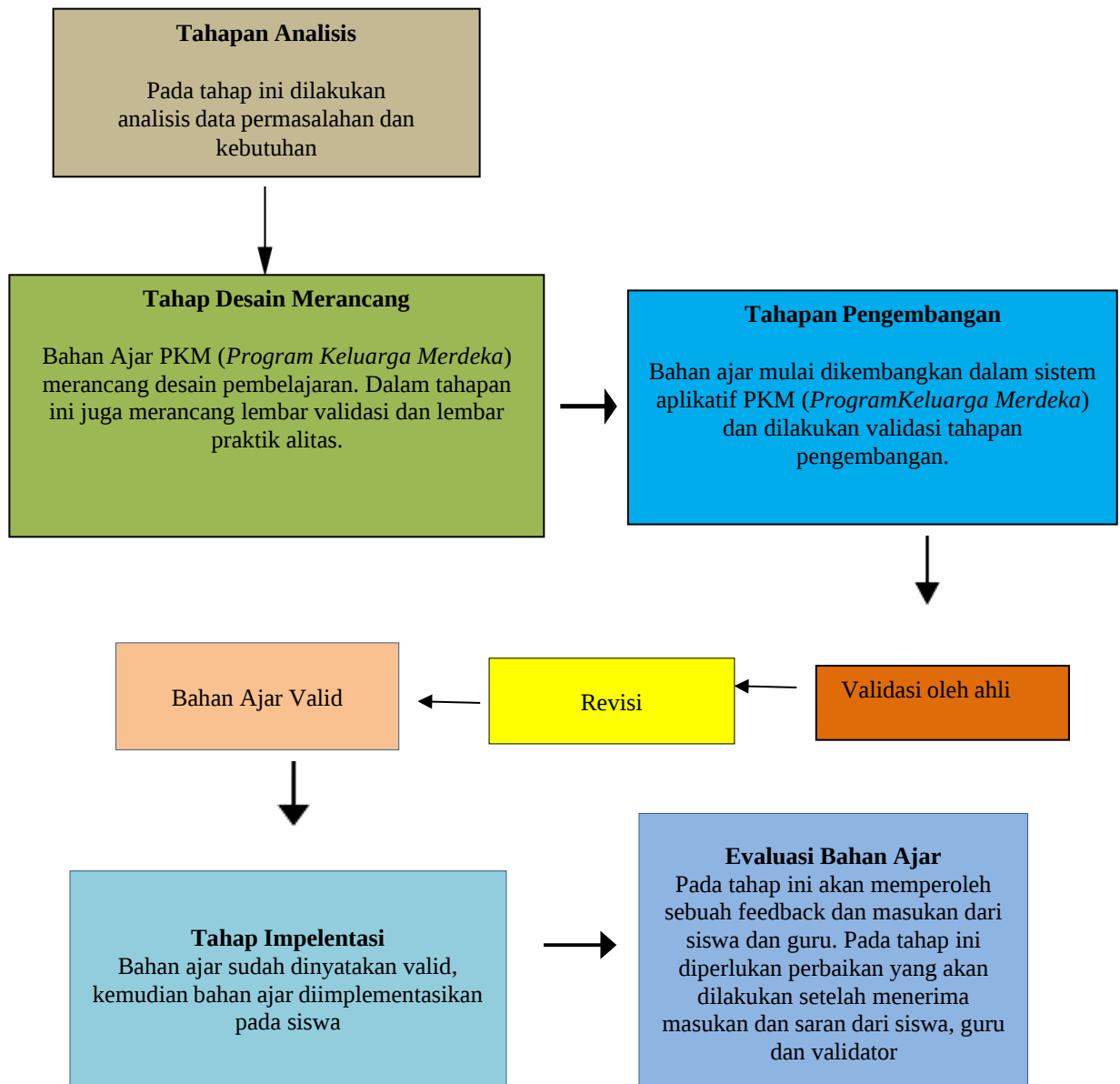
hak kaum disabilitas.

Berdasarkan dari masalah yang telah dipaparkan munculah gagasan novelti penulis yakni PKM (Program Keluarga Merdeka) sebagai bentuk pendidikan alternatif berbasis keluarga dan humanistik. Isi dari Program Keluarga Merdeka meliputi pendidikan kesehatan mental, pendidikan pola asuh anak ABK, konsultasi perkembangan psikis anak ABK, pembelajaran forlam untuk ABK, dan terapi mental untuk ABK. Dengan adanya Program Keluarga Merdeka diharapkan mampu untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan fokus tujuan pendidikan untuk semua kalangan.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian dan pengembangan atau Research and Development (RnD). Model pengembangan yang digunakan adalah ADDIE atau Analyze, Design, Develop, Implement dan Evaluate. Perancangan media ini meliputi tahap: (1) analisis kebutuhan, (2) desain, (3) pengembangan produk, (4) implementasi, (5) Evaluasi. Program ini diharapkan mampu untuk menjadi inovasi baru dalam dunia pendidikan khususnya dalam bidang pengembangan pembelajaran terhadap pendidikan inklusi. Data yang dikumpulkan melalui pelaksanaan evaluasi formatif dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu: (1) data evaluasi tahap pertama berupa data hasil uji pembelajaran, ahli desain pembelajaran, dan ahli media pembelajaran, (2) data evaluasi tahap kedua berupa data hasil uji coba perorangan dan uji coba lapangan, berupa data hasil review mahasiswa dan dosen pembimbing.

Menurut Barokati dan Annas (2013: 355) model ADDIE merupakan salah satu model penelitian dan pengembangan yang menjadi pedoman dalam mengembangkan pembelajaran yang efektif, dinamis dan mendukung pembelajaran itu sendiri. Hal ini sejalan dengan Tegeh dan Kirna (2013: 16) yang mengatakan bahwa model ADDIE merupakan salah satu model desain pembelajaran yang bersifat sistematis, model ini dikembangkan atau tersusun secara terprogram dengan tahapan kegiatan yang sistematis dalam upaya pemecahan masalah belajar yang berkaitan dengan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Berikut adalah tahapan perancangan media pembelajaran melalui metode ADDIE.



Gambar 1. Tahapan ADDIE

Pembahasan mengenai setiap tahapan pada model ADDIE yaitu sebagai berikut.

a. Tahap Analyze (Analisis)

Tahap analisis bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi pada siswa pada saat proses pembelajaran. Hal yang dilakukan pada tahap analisis yaitu, (1) analisis silabus, meliputi kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan materi pokok; (2) menganalisis sumber belajar, pada tahapan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu, ketersediaan, kesesuaian, dan kemudahan dalam memanfaatkannya; (3) analisis kebutuhan siswa, dalam analisis ini dilakukan wawancara dengan beberapa

siswa untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan siswa dalam proses pembelajaran.

b. Tahap Design (Perancangan)

Berdasarkan hasil analisis selanjutnya dilakukan tahap perancangan bahan ajar. Pada tahap ini peneliti mulai membuat desain rancangan awal berupa storyboard untuk memudahkan dalam membuat bahan ajar. Perancangan dilakukan secara manual. Hasil dari tahap ini adalah berupa kerangka bahan ajar yang akan dikembangkan. Pada tahap ini juga peneliti akan merancang lembar validasi bahan ajar dan merancang angket respon siswa yang berupa lembar praktikalitas. Angket respon ini nantinya akan diberikan kepada siswa sebagai bahan masukan dan saran terhadap desain produk.

c. Pengembangan

Menurut Cahyadi (2019) pengembangan dalam Model ADDIE berisi kegiatan realisasi rancangan produk dalam hal ini adalah bahan ajar. Langkah pengembangan dalam penelitian ini meliputi kegiatan membuat dan memodifikasi bahan ajar. Dalam tahap desain telah disusun kerangka konseptual pengembangan bahan ajar. Dalam tahap pengembangan kerangka konseptual tersebut akan direalisasikan dalam bentuk produk pengembangan bahan ajar yang siap untuk diimplementasikan sesuai dengan tujuan. Dalam melakukan langkah pengembangan bahan ajar ini nantinya akan ada dua tujuan penting yang perlu dicapai antara lain adalah : 1) Memproduksi atau merevisi bahan ajar yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, 2) Memilih bahan ajar terbaik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran.

d. Implementasi

Pada tahapan implementasi dalam penelitian ini merupakan tahapan untuk mengimplementasikan rancangan bahan ajar yang telah dikembangkan pada situasi yang nyata dikelas. Selama implementasi, rancangan bahan ajar yang telah dikembangkan diterapkan pada kondisi yang sebenarnya. Materi bahan ajar yang telah dikembangkan disampaikan sesuai dengan pembelajaran. Setelah diterapkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran kemudian dilakukan evaluasi awal untuk memberikan *feedback* pada penerapan pengembangan bahan ajar berikutnya. Tujuan utama dari langkah implementasi ini antara lain: 1) Membimbing siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, 2) Menjamin terjadinya pemecahan masalah untuk mengatasi persoalan yang sebelumnya dihadapi oleh siswa dalam proses pembelajaran, 3) Memastikan bahwa pada akhir pembelajaran, kemampuan siswa akan meningkat.

e. Tahapan Evaluation (Evaluasi)

Tahap evaluasi merupakan tahap akhir dimana dilakukan perbaikan (revisi) setelah menerima saran, komentar, dan masukan dari siswa, guru, dan validator.

Hasil dan Pembahasan

A. Pendidikan Alternatif

Pendidikan alternatif merupakan suatu program atau cara pemberdayaan peserta didik yang dilakukan dengan cara berbeda yaitu pendekatannya yang lebih bersifat individual, memberikan perhatian lebih besar kepada peserta didik, orangtua atau keluarga, pendidik dan dikembangkan berdasarkan minat dan pengalaman (Jadidah, 2016). Pendidikan alternatif dapat dimaknai sebagai sebuah praktik pendidikan yang berbasis pada masyarakat. Pemaknaan ini lebih didasarkan pada asumsi bahwa individu yang membutuhkan pendidikan adalah masyarakat, untuk itu masyarakatlah yang paling tahu mengenai apa yang ia butuhkan untuk kehidupannya (Fitriana, 2016). Pendidikan alternatif sebagai pilihan alternatif bagi masyarakat yang memiliki akses pendidikan terbatas, dan pelaksanaan pendidikan alternatif memiliki kontribusi signifikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Secara umum pendidikan alternatif memiliki ciri yang sama, yaitu menggunakan pendekatan yang bersifat individual, memberi perhatian besar kepada peserta didik, orangtua, keluarga, dan pendidik serta dikembangkan berdasarkan minat dan pengalaman (Ananda, 2018).

B. Kaum Disabilitas

Paradigma yang paling klasik adalah model biomedis atau *medical model of disability* yang dipengaruhi oleh Teori *Personal Tragedy* yang dipostulasikan oleh Barnes. Teori Barnes ini selanjutnya melahirkan model biomedis yang menyebutkan bahwa disabilitas disebabkan oleh semata-mata persoalan kondisi tubuh abnormal karena adanya *impairment* (kerusakan atau kelainan) (Syafi, 2014). Ragam dari penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, antara lain: 1) Penyandang disabilitas fisik, adalah terganggunya fungsi gerak, 2) Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, 3) Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, 4) Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera (Pawestri, 2017). *Disability* adalah suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan (sebagai akibat *impairment*) untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang manusia. Persepsi yang muncul dari istilah “penyandang cacat” adalah kelompok sosial ini merupakan kelompok yang serba kekurangan, tidak mampu, perlu dikasihani, dan kurang bermartabat (Sholeh, 2016).

C. Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang dialami seorang anak manusia ketika dilahirkan ke dunia. Dalam perkembangan selanjutnya keluarga juga merupakan lingkungan utama dalam pembentukan kepribadian seorang anak manusia. Masa-masa awal pertumbuhannya lebih banyak dihabiskan di dalam lingkungan keluarga (Wahyu, 2012). Keluarga merupakan pintu pertama, paling mendasar, dan sumber terpenting yang berfungsi meneruskan budaya melalui proses sosialisasi antara individu

dengan lingkungan (Suharyanto, 2015). Pendidikan yang baik dalam keluarga akan membentuk kepribadian anak yang baik, perkembangan kepribadian anak dapat dikendalikan dan dibentuk dengan bimbingan dan bantuan, terutama keluarga karena keluarga tempat pendidikan pertama kali bagi anak (Hyoscyamina, 2011). Keberadaan orang tua memang sangat dibutuhkan ketika Anak berkebutuhan khusus masih berusia dini dan belum sekolah. Anak berkebutuhan khusus telah mendapatkan banyak sekali pengalaman dan pelajaran ketika mereka masih sering berinteraksi dengan keluarga. Peran keluarga sebagai agen sosialisasi primer memberikan pelajaran pertama kepada anak akan nilai, norma, sikap, dan harapan diterima dari keluarga dengan seiringnya dengan berjalan waktu, yang berkaitan bertambah usia (Kurniawan, 2018).

D. Pendidikan Humanistik

Pendidikan yang humanistik adalah pendidikan yang mampu mengakomodasi semua kepentingan stakeholder dalam dunia pendidikan. Pendidikan humanis yang ditafsirkan sebagai pendidikan yang diarahkan untuk kepentingan semua komponen pendidikan, yang tidak hanya berorientasi pada humanisme siswa tetapi juga pada para guru (Sarnoto, 2018). Humanistik juga memberikan sumbangannya bagi pendidikan alternatif yang dikenal dengan sebutan pendidikan humanistik (*humanistic education*) keseluruhan melalui pembelajaran nyata. Pengembangan aspek emosional, sosial, mental, dan keterampilan dalam berkarier menjadi fokus dalam model pendidikan humanistik (Syifa, 2017). Pendidikan berbasis humanistik juga bertujuan untuk membuat orang lebih baik dalam hidup. Saat ini pendidikan belum mampu mencapai tujuan dan sasaran pendidikan itu sendiri yang memanusiakan manusia dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada pada manusia (Idris, 2017). Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, siswa telah mampu mencapai aktualisasi diri secara optimal (Perni, 2019).

Analisis Data

A. Ketimpangan dan Diskriminasi Pendidikan Kaum Disabilitas

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2018 mengindikasikan bahwa, di Indonesia, hampir 3 dari 10 anak dengan disabilitas tidak pernah mengenyam pendidikan. Saat ini, anak usia 7-18 tahun dengan disabilitas yang tidak bersekolah mencapai angka hampir 140.000 orang. Mereka yang bersekolah pun menunjukkan kesenjangan yang signifikan dalam hal capaian pendidikan. Hanya 56 persen anak dengan disabilitas yang tamat sekolah dasar dibandingkan 95 persen anak tanpa disabilitas. Kesenjangan ini terus muncul pada tingkat yang lebih tinggi, dengan 26 persen anak dengan disabilitas yang menyelesaikan jenjang SMA dibandingkan 62 persen anak tanpa disabilitas (Karana, 2020). Pada mekanisme Seleksi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2014 lalu masih mencantumkan calon mahasiswa disyaratkan tidak tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, dan buta warna.

Akibatnya, penyandang disabilitas banyak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Data di Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015, menyebutkan penyandang disabilitas usia 5-29 tahun hanya 36,49 persen yang sekolah, sebanyak 41,89 persen tidak bersekolah/putus sekolah dan sebanyak 21,61 persen tidak pernah sekolah (Widodo, 2019). Berdasarkan dari data tersebut diketahui bahwa pendidikan inklusi yang diciptakan oleh pemerintah masih belum dapat menjamin ketimpangan pendidikan terhadap kaum disabilitas. Pendidikan inklusi dan peraturan pemerintah tersebut hanya menjadi pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan untuk semua kalangan, dalam artian kebijakan tersebut masih belum benar-benar diterapkan oleh pemerintah secara nyata. Oleh karena itu perlu adanya sebuah inovasi baru dibidang pendidikan yang bersifat nyata dan dapat mewadahi hak-hak kaum disabilitas secara adil dan merata.

B. Solusi yang Pernah Ditawarkan

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas. Kebijakan itu diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional. Sebagai payung hukum pendidikan inklusi, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Mandikdasmen nomor 380 tanggal 20 Januari 2003 perihal pendidikan inklusif. Selain itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang

Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa (Widodo, 2019). Pada 1 Desember 2021, Presiden Joko Widodo resmi melantik keanggotaan Komisi Nasional Disabilitas. Staf Khusus Presiden, Angkie Yudistia, mengatakan, pembentukan Komnas Disabilitas ini menjadi bukti komitmen pemerintah terhadap perlindungan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas (Yanuar, 2021). Dalam praktiknya, penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia saat ini masih memiliki banyak kendala. Salah satu faktor penghambat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah lingkungan sekitar yang tidak ramah dan menyulitkan bagi masyarakat penyandang disabilitas untuk melakukan proses pembelajaran. Agar pendidikan inklusi dapat terselenggara dengan baik, maka sekolah inklusi perlu mengadopsi cara pandang model sosial terhadap kaum disabilitas. Penerapan model sosial ini, para guru dan sekolah harus peduli terhadap tantangan yang menghambat pendidikan inklusi. Diantaranya, yaitu hambatan fisik, komunikasi, sosial, dan kurikulum.

C. PKM (Program Keluarga Merdeka) Humanis Berbasis Keluarga

PKM merupakan program yang ditawarkan untuk mengatasi ketimpangan pendidikan pada kaum disabilitas. Bentuk dari Program Keluarga Merdeka ini yaitu berupa kegiatan pemberdayaan pada kaum disabilitas yang berfokus pada pemenuhan akses pendidikan untuk kaum disabilitas yang masih belum terpenuhi oleh pemerintah. Tujuan dari adanya Program Keluarga Merdeka adalah sebagai sarana atau wadah dalam memberikan akses pendidikan yang layak kepada kaum disabilitas. Sasaran Program Keluarga Merdeka ini adalah keluarga yang memiliki anak atau

anggota keluarga yang berkebutuhan khusus atau kaum disabilitas. Kemudian aktor atau pelaku dari Program Keluarga Merdeka ini yaitu pihak keluarga ABK, pemerintah melalui menteri sosial dan menteri pendidikan, mitra PKM yaitu psikolog, psikiater, guru SLB, dinas sosial dan dinas pendidikan daerah. PKM ini memiliki prinsip kerja yang mengadopsi empat prinsip dasar dari Driyarkara yakni 4 H humanisme, humanisasi, humaniora dan humanitas. Prinsip 4 H ini bertujuan tidak hanya memberikan arahan atau sosialisasi kepada masing-masing keluarga terkait dengan pentingnya keluarga yang harmonis dan peduli terhadap kondisi psikis anak, akan tetapi juga berfokus terhadap bagaimana cara mendidik anak disabilitas dengan memanusiakan mereka tanpa melihat sisi keterbatasan mereka. Berikut adalah penjelasan terkait empat prinsip menurut Driyarkara (Idris, 2017).

a. Humanisme

Pendidikan oleh humanisme dilihat sebagai penyempurnaan diri dari peserta didik. Dalam hal ini anak yang memiliki disabilitas tentu saja memiliki kekurangan dan kelemahan, oleh sebab itu keluarga sebagai agen sosialisasi terdekat tidak boleh memandang keterbatasan yang mereka miliki sebagai kekurangan mereka, akan tetapi keluarga harus memberikan motivasi kepada mereka bahwa kekurangan yang mereka miliki dapat menjadi kelebihan mereka, dengan begitu anak dapat menjadi termotivasi untuk menjadi pribadi yang tangguh.

b. Humanisasi

Tujuan dari humanisasi sendiri adalah memanusiakan manusia. Dalam hal ini yang dimaksud memanusiakan manusia adalah bagaimana proses pendidikan yang diterapkan kepada ABK tersebut tidak bersifat diskriminatif atau memandang rendah mereka.

c. Humaniora

Salah satu visi dari humaniora yaitu bagaimana sistem pendidikan alternatif ini dapat menjadi wadah yang efektif bagi kaum disabilitas dengan cara pengajaran yang bersifat humanisasi dan berpedoman pada unsur-unsur pemanusiaan manusia. Dalam hal ini keluarga berperan sebagai pendidik yang mampu menjadi “rumah” untuk mereka berkeluh kesah.

d. Humanitas

Humanitas merupakan tahap terakhir dari ketiga prinsip tersebut, dalam prinsip humanitas sendiri keluarga sebagai rumah untuk mereka pulang harus dapat mendidik mereka menjadi seseorang yang berbudaya, cerdas, dan memiliki rasa empati kepada sesama manusia. Prinsip 4 H ini menjadi landasan dari keterlaksanaan seluruh program unggulan dalam PKM, adapun program – program dari PKM adalah sebagai berikut :

1. Tahap Sosialisasi Keluarga ABK

Pada tahap sosialisasi ini tim PKM yang bekerjasama dengan pihak atau lembaga terkait seperti Sekolah Luar Biasa, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta Psikolog memberikan pengarahan dan sosialisasi mengenai rincian kegiatan pembelajaran dan pengenalan Program Keluarga Merdeka kepada pihak keluarga yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Sosialisasi ini dilakukan dengan menjelaskan visi misi, tujuan kegiatan, dan mengedukasi keluarga mengenai pentingnya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Kegiatan sosialisasi ini

dilakukan selama satu bulan sebelum memulai kegiatan training dan pelatihan kependidikan. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan materi-materi seputar pendidikan alternatif humanisme berbasis keluarga. Dimana nantinya keluarga yang akan menjadi guru untuk anak penyandang disabilitas.

Tujuan sosialisasi ini adalah untuk membekali keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus agar dapat menjadi pendidik yang baik dan tidak bergantung pada guru. Terutama di masa pandemi covid-19 ini, dimana kegiatan belajar mengajar sangat terbatas untuk dilakukan secara luring. Oleh karena itu PKM (Program Keluarga Merdeka) hadir untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Pada tahap sosialisasi nantinya keluarga ABK akan dibekali ilmu tentang berbagai macam kemampuan dalam mendidik anak ABK dengan baik dan benar. Selain itu keluarga ABK juga akan diberikan pelatihan atau mentoring selama kegiatan sosialisasi tentang cara-cara menenangkan ABK yang sedang depresi dan sulit untuk melakukan hal-hal baru. Tak hanya itu, tim PKM juga akan memberikan solusi mengenai bagaimana cara yang tepat untuk menjadi pendengar yang baik ketika ABK sedang membutuhkan tempat untuk berkeluh kesah. Sehingga dengan pembekalan kemampuan dasar tersebut diharapkan keluarga ABK mampu untuk menjadi rumah yang nyaman bagi ABK.



Gambar 2. Modul Materi Sosialisasi

2. Training dan Pelatihan Kependidikan

Tahap kedua setelah sosialisasi adalah pelatihan kependidikan. Berikut adalah beberapa poin dari tahap *Training*:

a. Sasaran Training

Sasaran dari program pelatihan kependidikan ini yaitu anggota keluarga terdekat dari ABK yang nantinya akan dilatih dan didampingi langsung oleh mentor-mentor yang profesional di bidangnya terkait dengan penanganan anak berkebutuhan khusus.

b. Tujuan Training

Pelatihan ini berlangsung selama enam bulan dan pelatihan ini bertujuan agar keluarga dapat semakin mantap dan profesional

dalam menangani dan mendidik anak berkebutuhan khusus di rumah secara mandiri tanpa tergantung pihak lain. Pelatihan ini tentu saja akan dibiayai full oleh pemerintah.

c. Materi Program

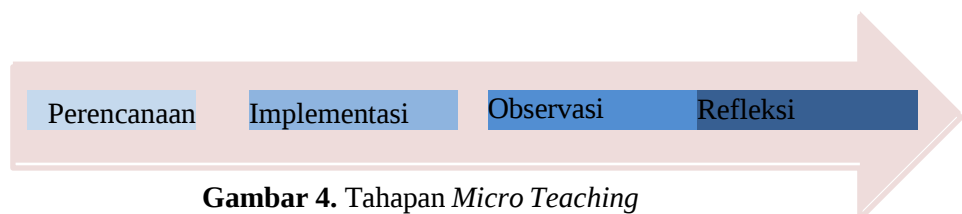
Dalam pelatihan kependidikan ini nantinya keluarga akan dibekali dasar-dasar mendidik anak berkebutuhan khusus dan bagaimana cara mengenali perilaku mereka dan apa saja yang mereka butuhkan. Selain itu pelatihan ini juga akan membekali keluarga dengan ilmu-ilmu psikologi dan ilmu-ilmu lainnya yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan keluarga penyintas agar dapat menjadi pendidik yang berkualitas, sehingga nantinya diharapkan keluarga penyintas dapat melakukan praktik kependidikan.



Gambar 3. Modul Materi Pelatihan Kependidikan

3. *Micro Teaching*

Setelah tahap pelatihan kependidikan, tahap selanjutnya yang harus dilakukan oleh keluarga ABK adalah kegiatan pembelajaran mikro. Kegiatan ini bertujuan agar mengetahui apakah materi-materi dari tahap sosialisasi hingga tahap pelatihan kependidikan dapat diterima dengan baik oleh keluarga ABK atau belum. Selain itu, pada tahap pembelajaran mikro ini keluarga ABK akan melakukan praktik sederhana mengajar atau mendidik anak mereka dengan menggunakan materi-materi yang telah dijelaskan pada tahap sosialisasi dan tahap pelatihan kependidikan.



Gambar 4. Tahapan *Micro Teaching*

Micro teaching adalah sebuah pembelajaran dengan salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara micro atau disederhanakan. Penyederhanaan disini

terkait dengan setiap komponen pembelajaran, misalnya dari segi waktu, materi, jumlah siswa, jenis keterampilan dasar mengajar yang dilatihkan, penggunaan metode dan media pembelajaran, dan unsur-unsur pembelajaran lainnya. Sedangkan pihak yang akan mendampingi kegiatan pembelajaran mikro ini adalah pihak-pihak yang berkompeten dibidangnya yaitu guru SLB dan bantuan Psikolog sebagai pendamping dan pengamat saat kegiatan pembelajaran mikro berlangsung.



Gambar 5. Sertifikat Pelatihan

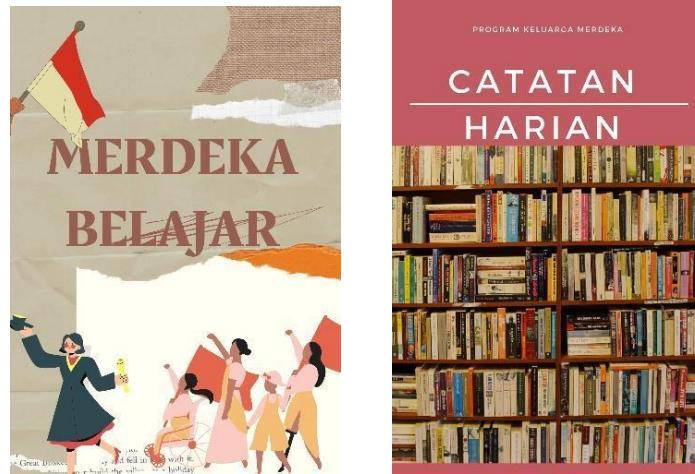
4. Terapi Psikis dan Konseling ABK

Kegiatan terapi psikis dan konseling ini nantinya akan dilakukan setiap minggu dan dilakukan oleh mitra Program Keluarga Merdeka. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar dapat memantau kondisi psikis dan mental dari anak berkebutuhan khusus. Selain itu, tujuan dari terapi dan konseling ini agar membantu anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas tidak merasa bosan terhadap pembelajaran yang telah dilakukan dan sebagai wadah mereka dalam mencurahkan isi hati dan pikiran mereka. tak hanya itu, program terapi dan konseling yang dilakukan secara berkala ini juga diharapkan mampu untuk menggali dan mengenali lebih lanjut mengenai minat dan bakat penyandang disabilitas dalam meraih cita-cita mereka.

5. Asesmen Kependidikan

Tahap yang terakhir adalah melakukan asesmen pendidikan yang telah dilakukan oleh keluarga, dimana nantinya keluarga sebagai pendidik anak disabilitas akan diberikan buku khusus atau catatan selama kegiatan berlangsung. Tujuan dari adanya asesmen ini adalah: 1) Untuk mengetahui kemampuan anak, 2) Untuk mengetahui habatan belajar anak, 3) Untuk mengetahui perkembangan belajar anak, 4) Untuk mengetahui kebutuhan belajar anak. Asesmen kependidikan ini dilakukan setiap bulannya dan dilaporkan kepada tim PKM sebagai data dan untuk bahan evaluasi program. Evaluasi nantinya akan dilakukan diakhir periode guna mengetahui apa saja kelemahan dan kelebihan Program Keluarga Merdeka. Selain itu evaluasi bertujuan untuk meningkatkan sistem pembelajaran pada Program Keluarga Merdeka. Selain itu, program PKM ini nantinya akan memiliki *output* luaran

berupa poster edukasi tentang penyandang disabilitas yang nantinya akan di unggah pada media sosial dan akan ditempelkan pada tempat-tempat umum.



Gambar 6. Buku Catatan Harian dan Poster

Kesimpulan

PKM (Program Keluarga Merdeka) merupakan program yang ditawarkan untuk mengatasi ketimpangan pendidikan pada anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. PKM hadir dengan prinsip kerja 4 H yakni humanisme, humanisasi, humaniora dan humanitas dimana prinsip ini bertujuan untuk menciptakan pendidikan alternatif bagi kaum disabilitas yang menekankan pada aspek keluarga dan memanusiakan manusia. PKM memiliki 6 program unggulan yakni sosialisasi kepada keluarga ABK, training dan pelatihan kependidikan untuk keluarga ABK, *micro teaching*, praktik kependidikan, terapi psikis dan asesmen pendidikan. Bentuk – bentuk program PKM meliputi poster edukatif, modul pendidikan ABK, fasilitas pembelajaran seperti braile dan sejenisnya, sertifikat pelatihan, buku catatan harian, ujian atau asesmen dan modul pelatihan. PKM menjadi solusi mudah yang memiliki potensi implementatif, efektif, dan efisien dan sederhana namun tetap memiliki keunggulan yakni memberikan sistem pembelajaran alternatif yang tidak bergantung pada guru dan dapat dilakukan dan diterapkan oleh keluarga.

Daftar Pustaka

- Ananda, N. K. (2018). Evaluasi Program Pendidikan Alternatif Di Kota Bandar Lampung. *PEDAGOGIA*, 16(1), 60-80.
- Barokati, N., dan Annas, F. (2013). Pengembangan Pembelajaran Berbasis *Blended Learning* Pada Mata Kuliah Pemrograman Komputer (Studi Kasus: UNISDA Lamongan). *Jurnal Sistem Informasi* Vol. 4 (5), 352-359.
- Fitriana, A. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Pendidikan Homeschooling sebagai Pendidikan Alternatif dalam Mengembangkan Potensi Anak di Homeschooling kak Seto Jakarta Selatan. *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (EPlus)*, 1(1).
- Fetty Ismandari, Situasi Disabilitas (Jakarta, 2019), hlm.3.
- Hyoscyamina, D. E. (2011). Peran keluarga dalam membangun karakter anak. *Jurnal Psikologi*, 10(2), 144-152.
- Idris, S., & Tabrani, Z. A. (2017). Realitas konsep pendidikan humanisme dalam konteks pendidikan Islam. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 3(1), 96-113.
- Jayani, Dwi Hadya. 2021. Penyandang Disabilitas Masih Mengalami Ketimpangan Pendidikan. [databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/02/penyandangdisabilitas-masih-alami-ketimpangan-pendidikan). Diakses pada 17 Februari 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/02/penyandangdisabilitas-masih-alami-ketimpangan-pendidikan>
- Kurniawan, L. J. (2018). *Sosialisasi Orang Tua Dalam Membentuk Kemandirian Anak Berkebutuhan Khusus Yang Bersekolah Di Sekolah Luar Biasa Bahanul Amanah Kabupaten Madiun Jawa Timur* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Pawestri, A. (2017). Hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM internasional dan HAM nasional. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(1).
- Perni, N. N. (2019). Penerapan Teori Belajar Humanistik dalam Pembelajaran. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 3(2), 105-113.
- Sarnoto, A. Z. (2018). Paradigma Pendidikan Humanistik Dalam Pendidikan Berbasis Al Quran. *J. MADANI Inst*, 7(1), 101-106.
- Syafi'ie, M. (2014). Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. *Inklusi*, 1(2), 269-308.
- Sholeh, A. (2016). Islam dan penyandang disabilitas: telaah hak aksesibilitas penyandang disabilitas dalam sistem pendidikan di indonesia. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 8(2), 293-320.
- Suharyanto, A. (2015). Pendidikan dan Proses Pembudayaan dalam Keluarga. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 162-165.
- Syifaâ, R. (2008). Psikologi humanistik dan aplikasinya dalam pendidikan. *ElTarbawi*, 1(1), 99-114.
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang disabilitas di indonesia: perkembangan istilah dan definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial (Journal of Social Welfare)*, 20(2).
- Wahy, H. (2012). Keluarga sebagai basis pendidikan pertama dan utama. *JURNAL ILMIAH DIDAKTIKA: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran*, 12(2).

Fatimah, I., & Mutiara, N. A. L. (2016). Biosynthesis of Silver Nanoparticles using Putri Malu (*Mimosa pudica*) Leaves Extract and Microwave Irradiation Method. *Molekul*, 11(2), 288.
<https://doi.org/10.20884/1.jm.2016.11.2.221>